

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Setiawati, “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 5 No. 1 Maret 2018, hlm. 66.
- Ihsan, Moch Musoffa, *Ketahanan Masyarakat Desa*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta: 2015, hlm. 8
- Sarif, “Produk Hukum Pengkebirian Pemerintahan Desa”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-49 No.1 Januari-Maret 2019*, hlm. 61
- Fadhilah, Nur dkk. *Pedoman Penyusunan Skripsi FASIH 2018*, (Tulungagung: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2018), hal. 14
- Mulyadi, *Implementasi kebijakan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), 45
- Usman, Nurdin *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002), 170
- Bintarto, R. “*Dalam Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*” (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989
- Nas, Jayadi “Demokrasi dan Demokratisasi: Konsep, Teori, dan Aplikasinya,” *Wacana Indonesia. Jurnal Pemikiran Mahasiswa No. 1. Mei 2005*. hal. 24
- Harijanti, Susi Dwi, Lailani Sungkar, Wicaksana Dramanda, 2020. Laporan Hasil Penelitian “Pengujian Formil Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi: Urgensi Dan Batu Uji”, Bandung, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, hlm 77.

- Sjarif, Fitriani Ahlan, “Arti Meaningful Participation dalam Penyusunan Peraturan, Hukumonline, 13 Juli 2021, dikutip dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-imeaningfulparticipation-i-dalam-penyusunan-peraturan-lt62ceb46fa62c0>
- Widjaja, H.A.W. 1992, Pemerintah Desa dan Administrasi Desa, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Josef Mario Monteiro, 2016, Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- “Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Pali Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja”, jurnal Departemen Administrasi Publik, Universitas Hasanuddin, Volume 1 Issue 1, June 2021
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 15
- Bungin, Burhan, Metodologi Penelitian Kualitatif ; Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), Cet 8, h. 124.
- Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta,2010)hal.3
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), Hal. 62
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hal. 235
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2013) hal. 369
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2013) hal. 369

Setiawati, “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 5 No. 1 Maret 2018, hlm. 64.

Abadi, Supriadi Jaya, (2018), “*Peranan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Proses Legislasi Peraturan Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai*”, Makassar: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, <https://digilibadmin.unismuh.ac.id/> , diakses pada tanggal 17 Mei 2022.

Yuda Dede, Wahyu Nurhuda. “Implementasi Azas Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Peraturan Desa Sesuai Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Guranteng Kecamatan Pageurageng Kabupten Tasikmalaya”, *Jurna Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 1, (Universitas Bakti Tunas Husada Tasikmalaya, 2024). Hal 10-16

Oktavia, One Maria. “Penguatan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, *jurnal* (Universitas Airlangga, 2022) hal. 1419

BUKU

Henk Adding (2020), *Buku Panduan Hak Asasi Manusia dan Tata Pemerintahan yang Baik, Proyek Asialink Tentang Pendidikan dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Hak Asasi Manusia*, hal.36.

Robert A. Dahl (2001) *Perihal Demokrasi, menjelajahi Teori dan Praktik Demokrasi Secara Singkat*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta Hal.15

Eko, Sutoro., dkk. 2014. “Desa Membangun Indonesia”. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa bekerjasama dengan Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS) Tahap II.

PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ngablak Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ngablak

Pasal 12 Peraturan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ngablak Nomor 02 Tahun 2019

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pasal 1 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020 tentang konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja, hlm 393.

Pasal 96 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Putusan MK Nomor 91/PUU/XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 69 ayat 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

Pasal 69 ayat 1 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 68 ayat 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (2014), Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Departemen Dalam Negeri, Jakarta.

SKRIPSI

Jalal, Muhammad Torikul, “Problem Dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi Kasus Di Desa Malinau Kota) ”, Skripsi, (Tarakan:Universitas Borneo Tarakan .2022). hal.45

Wahyudi, Dwi, “Mekanisme Pelaksanaan Pembuatan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi di Desa Sukoharjo 03 Barat, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu) ”, Skripsi, (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2019). hal.77

Anggraini, Friska Ayu, Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perumusan Peraturan Desa Di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur ”, Skripsi (Lampung Timur: IAIN METRO. 2021). hal.41

WEBSITE

Sumber <https://www.masterplandes.com/kak/penyusunan-rancangan-peraturan-desaraperdes/> diakses pada tanggal 19 November 2024

Sumber <https://www.layananbimtek.com> diakses pada tanggal 19 November 2024 jam 11.14

Sumber <http://digilib.unila.ac.id/9032/12/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 2 januari 2025

Sumber <https://dosenppkn.com/pentingnya-perundang-undangan/> diakses pada 18 November 2024

Sumber <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/414>, diakses pada tanggal 18 November 2024

- Sumber <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/17174/kampung-kb-desa-ngablak> diakses pada 29 November 2024 Pukul 16.30 WIB
- Sumber <https://dpmd.jemberkab.go.id/artikel/10106/penetapan-dan-penegasan-batas-desa> diakses pada tanggal 2 januari 2025
- Sumber <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download/355/314> diakses pada 03 januari 2025
- Sumber https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show_detail&id=4112 diakses pada tanggal 02 januari 2025
- Sumber <https://lptp-fia.ub.ac.id/undang-undang-republik-indonesia-nomor-6-tahun-2014-tentang-desa/#:~:text=Pemberdayaan%20Ekonomi%20Desa%3A%20Undang%20Undang,menengah%20serta%20pemberdayaan%20masyarakat%20desa.> Diakses pada 12 November 2024
- Sumber <https://rancaekekwetan.desa.id/artikel/2022/2/8/undang-undang-nomor-6-tahun-2014-tentang-desa> diakses pada tanggal 2 januari 2025
- Sumber <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/614> diakses pada 15 oktober
- Sumber <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-makna-peraturan-dan-peraturan-perundang-undangan-lt664b716d7358b/> diakses pada tanggal 02 januari 2025
- Sumber https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-desa/#google_vignette diakses pada 15 oktober
- Sumber <https://www.masterplandes.com/kak/penyusunan-rancangan-peraturan-desa-raperdes/> diakses pada tanggal 02 januari 2025
- Sumber <https://id.scribd.com/document/540824365/1-PENGERTIAN-DESA> diakses pada 03 desember

Sumber <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-desa/> diakses apada tanggal 02 januari 2025

Sumber <http://tajur-citeureup.desa.id/berita/read/masyarakat-pedesaan-3201032004#:~:text=Masyarakat%20desa%20merupakan%20kelompok%20manusia,dilakukan%20secara%20teratur%20atau%20terstruktur.> diakses pada 09 Oktober 2024

Sumber <https://hukum.malangkota.go.id> diakses pada tanggal 19 November 2024

Sumber <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-makna-peraturan-dan-peraturan-perundang-undangan-lt664b716d7358b/> diakses pada tanggal 02 januari 2025

Sumber <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-cl4012/> diakses pada 02 januari 2025

Sumber <https://jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/download/614/466> diakses pada tanggal 02 januari 2025

Sumber <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnalilmiahsociety/article/download/12440/12012/24794> diakses pada tanggal 02 januari 2025

Sumber http://sirisma.unisri.ac.id/berkas/41naskah-A5_Joko-Pramono_Implementasi-....pdf diakses pada tanggaaal 02 jnuri 2025

Sumber <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/download/21950/21651> diakses pada tanggal 02 januari 2025